

RADIKALISME AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA YANG AGAMIS DAN BERPANCASILA

Oleh:
Agustinus Wisnu Dewantara
STKIP Widya Yuwana

Abstract

The reality of religious radicalism in Indonesia is increasingly troubling every day, especially after reform. Religious radicalism is displayed in heartbreaking (inhuman) acts of dishonesty, such as the Bali Bombing, Poso tragedy, Ambon, Sambas, Tolikara, etc. All that is evil, such as the act of killing, terrorizing, burning, destroying fellow humans is strangely framed in the name of religion. This paper wants to limit itself to discussing religious radicalism in Indonesia from a philosophical and theological point of view. The method used is the verstehen method by listening to the reality of radicalism and looking at it in the eyes of philosophy. This becomes important for the growth of a good attitude in objectively viewing religions and living them properly in the context of a multicultural and Pancasila Indonesia. Religious theology, education and lectures should be education of peace, humanist aspects of growth, human culture bloomers, and not education about mastering religious materials that are very formal. Religious education must be in harmony with the values of the nation's called Pancasila

Keywords: radicalism, religion, Pancasila, Indonesia

I. PENGANTAR

Kata “radikalisme” secara etimologis berasal dari kata “*radix*” yang berarti akar. Radikalisme dengan demikian adalah paham atau gerakan yang menginginkan pembaharuan dengan mengembalikan diri mereka ke “akar” secara ekstrim. Pandangan ini kerap disandingkan dengan gerakan fundamentalisme. Gerakan radikal biasanya dicapai dengan segala cara, mulai dari cara yang halus sampai cara yang keras sekalipun (Asrori: 2015: 255). Ada banyak jenis gerakan radikal dan motivasi yang membingkainya, akan tetapi karena yang dibahas dalam seminar ini adalah radikalisme agama, tulisan ini hendak membatasi diri untuk membicarakan radikalisme agama di Indonesia dari sudut pandang filosofis dan teologis. Hal ini menjadi penting bagi tumbuhnya sikap yang arif dalam memandang agama-agama secara objektif dan menghayatinya secara benar dalam konteks Indonesia yang multikultural dan ber-Pancasila.

Realitas radikalisme agama di Indonesia kian hari kian menggelisahkan, khususnya pasca reformasi. Radikalisme agama ditampilkan dalam tindakan *dishumanis* (tak manusiawi) yang memilukan, seperti Bom Bali, tragedi Poso, Ambon, Sambas, Tolikara, dst (Umar, 2010:146). Segala apa yang jahat, seperti tindakan membunuh, menteror, membakar, memusnahkan sesama manusia itu anehnya dibingkai atas nama agama. Hal yang memilukan lagi adalah bahwa ternyata para tokoh, pelaksana, eksponen, pelaku kekerasan itu adalah orang-orang yang mengaku beragama. Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah agama mengajarkan orang menjadi radikal dan tega menyakiti? Apakah artinya agama jika tidak melestarikan kehidupan manusia? Masih terekam dengan jelas bagaimana mencekamnya peristiwa peledakan bom yang dibingkai oleh motivasi agama. Di berbagai media diutarakan berbagai wawancara dan tayangan yang berisi alasan mengapa teror bom dilakukan. Motivasi yang amat kentara adalah alasan agamis (Rokhmad, 2012: 57). Lagi-lagi agama dibawa-bawa sebagai pengesahan atas suatu tindakan brutal, seakan-akan mati dengan cara demikian akan secara otomatis membuka surga bagi para pelakunya. Begitu mudahkah akhirat dicapai dengan cara demikian? Apakah dengan demikian agama menjadi biang kejahatan?

II. RADIKALISME AGAMA

2.1. Radikalisme Agama: Gerakan Membela Tuhan?

Gerakan radikal dalam membela Tuhan dan agama menjadi aktivitas yang terus berulang dalam sejarah manusia. Sejak manusia mengenal agama, kebenaran agamis dan iman akan Tuhan menjadi bahan bakar bagi aneka gerakan ini. Ada dua cara dalam memandang hal ini, yakni secara positif dan negatif. Secara positif, manusia dengan gairah ini hendak mengukuhkan adanya otoritas Allah yang telah diyakininya. Secara negatif, aneka semangat semacam ini kadang kala berbenturan keras dengan aliran lain, yang kerap kali memunculkan rasa fanatisme, apologisme, bahkan terorisme yang paling keras sekalipun (Asrori, 2015: 255-256). Pencarian otentisitas keagamaan yang sangat bersemangat pada gilirannya ternyata cenderung berujung pada meningkatnya perjumpaan secara keras dengan pihak lain.

Endang Turmudi (2005) mengatakan bahwa secara sosiologis, setidaknya ada tiga gejala yang dapat ditengarai dari paham radikalisme, yaitu: *pertama*, merupakan respons penolakan terhadap ide dan kondisi sosial-politik-ekonomi yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. *Kedua*, penolakan ini berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara radikal ke arah tatanan lain yang sesuai dengan cara pandang dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, misalnya agama maupun ideologi lainnya. *Ketiga*, ada klaim kebenaran dan ideologi yang diyakininya sebagai sesuatu yang lebih unggul

daripada yang lain. Pada gilirannya, sikap *truth claim* ini memuncak pada sikap penafian dan penegasian sistem lain. Untuk mendorong upaya ini, ada pelibatan massa yang dilabelisasi atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional-agresif.

Haedar Nashir dalam disertasinya yang berjudul : Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (2007) mengatakan bahwa ada beberapa kelompok di Indonesia yang selalu *getol* melakukan perubahan secara radikal ketika menginstrumentalisasi keyakinannya. *Pertama*, kelompok yang tampil dengan ciri legal-formal yang menuntut perubahan sistem hukum yang sesuai tata aturan dan tuntunan hukum agama. *Kedua*, kelompok yang tampil dengan ciri doktriner dengan cara memahami dan mempraktikkan agama serba mutlak dan kaku. *Ketiga*, kelompok yang tampil dengan ciri militan yang berhaluan keras, bahkan tak segan melakukan penolakan frontal terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan bersikukuh ingin menjadikan syariah sebagai penggantinya. Paham radikalisme yang selalu digerakkan dalam berbagai momentum, dan tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan pihak-pihak lain, terutama kelompok ekstrem yang keberadaannya masih kecil tetapi suaranya sangat berisik (*noisy minority*). Ketika radikalisme agama dijadikan sebagai wadah pergerakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, sementara barisan mereka dilingkupi oleh ambisi kekuasaan dan politik, bukan tidak mungkin segala cara hingga yang paling ekstrem akan dilakukan, bahkan dibingkai dalam berbagai aksi yang berjilid-jilid untuk menekan dan mengintimidasi siapa pun yang dianggap berseberangan (Yunus, 2017: 94).

Iman akan Allah memang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kepercayaan akan kebesaran Tuhan memang selayaknya menjadi pendorong bagi makin mekarnya ketakwaan seseorang. Hal ini setidaknya terjadi dalam sejarah Gereja. Perang Salib dan aneka perang bernuansa agama menjadi penanda bagi perlunya membela kepentingan Allah di dunia. Agama harus dibela, apapun risikonya. Perang dan membunuh kadangkala harus dikerjakan jika memang itu jalan satu-satunya. Barangsiapa menodai agama, dia harus dihukum berat, bahkan mati jika perlu. Orang sehebat Galileo Galilei pun harus mengalami eksekusi ketika dituduh telah menista agama.

Membela agama dan pelbagai ajarannya sebenarnya sudah dilakukan pula oleh kaum Farisi. Mereka merasa begitu mencintai Allah dan adat istiadat Yahudi. Nilai-nilai dalam agama yang telah diyakini selama berabad-abad dan termaktub dalam Taurat harus dibela mati-matian. Orang Yahudi sejati bagi mereka adalah mereka yang menjalankan Taurat. Barangsiapa menista Taurat harus dihukum, bahkan orang yang mengaku sebagai Anak Allah sekalipun. Yesus harus disalib karena telah “mengobrak-abrik” praktek suci agama Yahudi. Agama bagi mereka, sekali lagi, harus dibela! Di titik ini muncul pertanyaan besar, yaitu: “Apakah

agama harus dibela sedemikian rupa? Apakah Tuhan yang Mahasempurna membutuhkan pembelaan manusia yang maharapuh?"

Charles Kimball (2004) pernah bertanya: "*Is religion the problem?*" Jawabannya bisa "no" dan bisa pula "yes." Jawaban atas pertanyaan tersebut bergantung pada bagaimana pemahaman manusia mengenai makna dan kodrat agama. Di satu sisi, agama memberikan pemaknaan atas hidup manusia. Tetapi di sisi lain, agama ternyata juga harus bersentuhan dengan berbagai persoalan seperti doktrin dan struktur kelembagaan yang menjadikan agama mempunyai dimensi sosial-politis sebagai sebuah *organized religion*. Seorang beragama bisa mengatakan bahwa yang salah (yang menyebabkan munculnya aneka tindak radikalisme, kekerasan, dan terorisme) adalah orang yang tidak memahami arti agamanya. Namun Wilson dalam *Against Religion Why We Should Try to Live Without It* (1990) berargumentasi: "Kalau agama itu benar, tetapi tidak mampu mempengaruhi tingkah laku para pemeluknya, lalu bagaimana membuktikan kebenaran agama itu? Dan apa gunanya agama yang benar tetapi tidak mampu mempengaruhi watak penganutnya menuju peradaban?" Ini adalah deretan pertanyaan retorik yang menggugah kearifan jawaban dari semua orang yang mengaku beragama.

Inilah masalah dari zaman ke zaman yang diwarisi bersama oleh semua umat manusia. Teologi dari semua agama mengatakan bahwa agama mereka sendirilah yang paling benar, dan yang lain salah atau menyimpang. Persis yang dikatakan oleh kaum teroris: "Kamilah yang paling benar dalam menjalankan ibadah, dan yang lain (penentang kami) adalah kafir, sehingga sah untuk dilenyapkan!" Di titik inilah Charles Kimball mengatakan "*when religions become evil*". Kimball memberi dua tanda yang menjadi penyebab mengapa agama bisa menjadi jahat: *Pertama*, adanya klaim-klaim kebenaran. Klaim atas kebenaran ini menuntut kesetiaan dan kesamaan interpretasi. Perbedaan penafsiran, apalagi perbedaan dalam pemahaman keimanan, mengakibatkan orang-orang yang berlawanan dicap sebagai sesat dan kafir. *Kedua*, ada semangat misionarisme yang militan dengan menggunakan segala macam cara (bahkan yang keji sekalipun) untuk menyelamatkan "orang kafir yang masih berlumur dosa." Orang lain yang tidak sepaham dengannya lalu dianggap sebagai pendosa yang harus ditobatkan.

Agama adalah tragedi umat manusia. Ia mengajak kita kepada kesadaran yang paling luhur dalam jiwa manusia, tetapi anehnya hampir tidak ada satu agama pun yang tidak ikut bertanggungjawab atas berbagai kekerasan, perang, aniaya, tirani, dan penindasan akan kebenaran. Oleh karena itu tidak heran jika dalam pemahaman yang semacam ini agama kerap digunakan sebagai motivasi untuk berperang, menganiaya sesama, membenarkan pendapat mereka sendiri atas yang lain, dan untuk mengklaim diri mereka sendiri sebagai pemilik tunggal

kebenaran. Peristiwa terorisme atas nama agama yang marak belakangan ini sungguh menjadi momentum yang baik dan sekaligus kritis bagi segenap umat beragama untuk berkaca. Agama (sejauh sebagai lembaga atau sistem kepercayaan, praktik dan nilai) adalah juga fenomen empiris yang mempunyai karakter sosio-historis, oleh karena itulah agama tentu menyisakan keberatan jika dimutlakkan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang mutlak, dan bukan agamanya! Pewahyuan Tuhan memang mutlak, namun kemampuan manusia menangkapnya terbatas, maka terbatas pulalah kemampuan manusia dalam menangkap misteri-Nya.

Agama kerap dipahami secara formal. Agama seakan-akan merupakan realitas lain yang terpisah dari realitas hidup sehari-hari. Realitasnya: hidup beragama terasa kompleks, rumit, dan sekaligus dangkal. Hal ini terjadi karena ukuran ketakwaan kepada Tuhan kerap dipikirkan dalam aneka wujud formal yang dangkal. Ketaatan kerap kita pikirkan dalam kaitannya dengan aktivitas kolosal membangun rumah-rumah ibadat, pusat-pusat keagamaan, radikalisme dan fanatisme perjuangan perkara ratifikasi suatu peraturan, hukum, syariat, dan yang semacamnya. Agama kerap diidentikkan dengan pelaksanaan hukum dan kewajiban agamis melulu. Pertanyaannya adalah: "Kapan orang bisa mewajibkan sesamanya untuk menjalankan agamanya? Atau, bolehkah instansi di luar dirinya mewajibkan sesuatu yang berkaitan dengan agamanya untuk ditaati? Pemerintah, umpamanya, bisakah mewajibkan saya untuk menjalankan segala delik ketentuan agama yang saya anut?"

Ide "kewajiban" adalah ide politis. Bukan ide religius. Kala Tuhan menciptakan manusia untuk pertama kalinya, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk bertindak ini atau itu. Relasi antara Tuhan dan manusia, pada waktu itu, bukan relasi legal. Bukan relasi sanksi-imbalan. Bukan relasi wajib dan pemaksaan. Relasi antara Sang Pencipta dan ciptaanNya (manusia) adalah relasi cinta. Cinta adalah kesetiaan. Bila tidak setia relasi cinta putus. Apakah Tuhan pada waktu itu menghukum ketidaksetiaan manusia? Dalam jalan pikiran wajar, harus dijawab: "tidak." Manusalah yang menghukum dirinya sendiri. Manusalah yang memutuskan relasi cinta itu. Manusalah yang mencabut dirinya dari kemesraan cinta Tuhan. Manusalah yang mencelakakan dirinya. Kalau agama dipahami sebagai relasi cinta dengan Tuhan, maka tidak bisa diandaikan ide tentang "kewajiban." Relasi cinta tidak bisa diwajibkan, apa pun alasannya. Relasi cinta, apalagi dengan Tuhan, adalah rahmat dan hidayahNya. Kewajiban beragama dengan demikian adalah reduksi ketaatan personal ilahi kepada jalan pikiran legal politis (sanksi-imbalan-pemaksaan). Dalam kewajiban beragama tidak ada kesetiaan, karena yang ada hanyalah formalitas, kekakuan, keterpaksaan, dan bahkan kemunafikan.

Terminologi “kewajiban” identik dengan kekuasaan yang *koersif* (memaksa). Thomas Hobbes menggagas kekuasaan pemerintahan yang *koersif* mutlak kepada warganegaranya. Konteks jalan pikiran Hobbes bukan menggagas absolutisme kekuasaan, melainkan pentingnya perdamaian. Kala tata hidup bersama tidak dipimpin oleh suatu pemerintahan yang kuat, manusia-manusia tampil beringas. Mereka saling menghantam dan saling bertengkar, maka diperlukan kekuasaan koersif yang dapat menjamin perdamaian. Agama di titik ini tidak boleh dipaksakan untuk atau atas nama perdamaian. Delik-delik ketentuan yang wajib dalam agama tidak boleh mengangkingi kebebasan manusia. Manakala pemaksaan suatu kewajiban beragama lahir dari suatu keputusan instansi pemerintah, atau bahkan dari pemimpin agama yang paling disegani sekalipun, koersifitas agama sepenuhnya bermakna politis. John Locke, filosof Inggris sesudah Hobbes, kala itu langsung berseru: Stop. Stop politisasi agama! Sebab politisasi agama adalah awal dari formalisme. Prinsip-prinsip kemanusiaan ditindas atas nama agama. Agama lantas tidak lebih dari sekedar justifikasi tindakan-tindakan yang kadang tidak adil dan bahkan kasar, maka disitulah muncul front pembela Tuhan yang bahkan berkuasa melaknat mereka yang dianggap menista agama. Pertanyaannya adalah: benarkah Tuhan membutuhkan pembela? Bukankah Tuhan adalah Sang Mahakuasa yang tidak membutuhkan pembelaan lewat demo yang berjilid-jilid? Kalau agama itu bisa dinistakan, apakah dengan demikian agama lebih hebat daripada Tuhan?

Agama adalah milik manusia. Artinya, hanya diri si manusia itu sendiri yang bisa mewajibkan dirinya untuk menjalankan agamanya. Bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan pemimpin agama, bukan KWI, bukan MUI, bukan PGI, bukan Bapa Suci, bukan MPR, bukan DPR, bukan Kardinal, bukan Kyai, bukan Konstitusi, bukan pula FPI. Tuhan sendiri bahkan tidak pernah memaksa! Tindakan memaksakan agama kepada manusia adalah lagak tindakan yang melampaui Tuhan. Siapakah dia yang bisa memaksakan agama? Manusia atau ormas bukanlah siapa-siapa, kecuali yang sombong dan congkak dalam pakaian kesucian politis yang munafik. Dengan demikian, siapa yang bisa mewajibkan agama? Hanya dirinya sendiri. Wajib beragama hanya mungkin mengalir dari cinta kepada Tuhan. Jika tidak dari cinta, wajib beragama adalah keterpaksaan. Keterpaksaan adalah kemunafikan.

Manusia terlalu mengira syariat dan hukum agama adalah tempat yang menyenangkan bagi kehadiran Tuhan di dunia. Manusia mengira kehebatan pusat-pusat keagamaan adalah tempat-tempat yang disukai oleh Tuhan. Yang lebih menyesakkan lagi, manusia mengira bahwa fanatisme, radikalisme, jihad dan yang semacamnya identik dengan heroisme keimanan kepada Tuhan. Aktivitas egoistik pribadi, golongan, maupun kelompok yang kita bungkus dengan aneka alasan suci, bahkan aneka ayat suci seakan-akan menyenangkan

Tuhan. Mengapa kita tidak pernah bertanya apakah Tuhan berkenan dan menyukai segala rencana dan tindakan tersebut?

Ubi caritas Deus ibi est (di mana ada cinta, di situ Tuhan hadir)! Hanya di mana ada cinta, di situ Tuhan hadir. Tuhan juga tidak meminta persembahan. Juga tidak segala macam bentuk korban bakaran. Pun tidak kata-kata indah dalam doa yang keluar dari mulut kita (sebab mulut kita berbau busuk lantaran seringnya mencerca, memvonis, menjelek-jelekan orang lain dan memprovokasi orang lain untuk melakukan aneka tindakan kekerasan), segala bentuk aktivitas heroisme dangkal berupa tindakan perang, terorisme, dan aneka macam sikap pembelaan dengan bungkus istilah-istilah suci, seperti "jihad," "martir," dan seterusnya. Rasanya, apabila konsekuensi dari semuanya itu berupa kesengsaraan, perseteruan, perpecahan, penderitaan, adala kehancur yang jauh dari karakter manusia-manusia yang beradab, sulit untuk memahami bahwa Tuhan berkenan dengan semua aktivitas heroik tersebut. Juga bahkan apabila segala aktivitas heroik itu memiliki justifikasi ayat-ayat dari Kitab Suci. *Ubi caritas Deus ibi est*. Tuhan meminta cinta! Hanya cinta. Sebab hanya cinta yang melestarikan hidup manusia.

2.2. Peran Lembaga Pendidikan Melawan Radikalisme Agama

Lubis (2014:4) mengatakan bahwa pasca disahkannya Undang-Undang Sisdiknas yang mengemuka justru formalisme sempit yang tampil dalam berbagai bentuk, dan semakin menguatnya derajat intoleransi agama (Lubis, 2014:4). Hasil survey Media Indonesia serta penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Media Indonesia, 2011:4) terhadap guru pendidikan agama Islam dan siswa SMP-SMA tentang toleransi terhadap agama lain menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi kehidupan bersama. Survey tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah menjadi sumber bertumbuhnya sikap membenci dan intoleransi terhadap mereka yang berbeda agama, dan ironisnya hal ini dilakukan oleh guru-guru agama. Survey juga menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap aksi kekerasan cukup tinggi, begitu juga tingkat kesediaan mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan terkait isu agama. *The Wahid Institute* bahkan merilis hasil kajiannya tentang masih tingginya semangat antitoleran di antara kaum beragama di Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 setelah Undang-Undang Sisdiknas diterapkan. Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 kasus (dari intimidiasi, pelarangan, hingga serangan fisik), sedangkan pada tahun 2012 terjadi 278 kasus (*The Wahid Institute*, 2014:2). Pertanyaannya yang kemudian mengemuka adalah: mengapa lembaga pendidikan justru menjadi penumbuh bibit radikalisme agama? Lalu apa peran kuliah agama, pendidikan agama, dan juga guru agama untuk mengatasi hal tersebut?

Tugas mengajar agama kepada anak didik bukanlah tugas yang mudah. Pelajaran Agama bukanlah ilmu yang serba pasti. Ada banyak persoalan di sini: Pertama, Tuntutan kurikulum yang hendak mengukur kemampuan siswa hanya dari angka belaka juga merupakan sesuatu yang problematis bagi Pendidikan Agama. Mengapa? Karena penghayatan agama tentu tidak bisa disempitkan begitu saja dalam angka. Kedua, mengajarkan Pendidikan Agama amat berkait dengan soal metodologi, yakni bagaimana cara mentransfer ilmu dengan baik kepada anak didik. Jika mendidik adalah soal bagaimana mentransfer pengetahuan, cukupkah dengan mentransfer kebenaran-kebenaran agamis dan dogmatis ke dalam sistem pengajaran agama? Hal tersebut kerap diperumit dengan pluralitas khas Indonesia.

Sudah jamak diketahui bahwa bangsa ini terdiri dari aneka suku, agama, dan budaya. Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional (No. 20 tahun 2003, Bab V Pasal 12 (1a)) memerintahkan supaya setiap anak didik mendapat Pendidikan Agama sesuai dengan keyakinannya dari guru yang seagama. Harus diakui persoalan pluralitas agama di Indonesia ternyata tidak selesai dengan mengajarkan agama sesuai dengan keyakinannya. Mengapa? Karena yang justru mengemuka di negara ini setelah Undang-Undang Sisdiknas tersebut disahkan adalah semakin seringnya terjadi kasus intoleransi agama! Pendidikan Agama yang eksklusif tersebut ternyata membuahkan aneka gerakan yang seakan merupakan negasi atas pondasi negara, yakni Pancasila (yang sebenarnya justru mengakomodasi perbedaan dan menolak semangat antitoleran). Alih-alih memecahkan masalah bangsa, Pendidikan Agama justru menjadi bagian dari masalah karena menimbulkan aneka konflik. Lalu bagaimana seharusnya Pendidikan Agama secara formal harus diberikan?

Aktivitas belajar (studi) adalah aktivitas kodrati manusia. Aktivitas pendidikan (apalagi pendidikan formal) dimaknai sebagai bagian kodrati dari setiap manusia untuk mempersiapkan masa depannya. Driyarkara mengatakan bahwa cipta, rasa, dan karsa adalah trias-dinamika yang dimiliki manusia. Keberadaan ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dan ada dalam diri manusia. Pengertian mendukung rasa, sebaliknya rasa mendukung keberadaan karsa manusia. Ketiga unsur tersebut mesti berkembang dan berjalan secara seimbang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur dinamika tersebut melengkapi pemahaman mengenai gambaran manusia yang mempunyai kemampuan untuk *self-reflection*. Puncak dari dinamika itu adalah kebersatuan manusia dengan Sang Mutlak, Tuhan (Driyarkara, 1980:72-74).

Dinamika antara ketiganya membuat manusia itu tetap hidup, tidak hanya secara biologis, tetapi secara manusiawi. Dinamika dalam konteks ini menjelaskan mengenai situasi sepanjang hidup manusia yang tidak pernah berakhir. Keseluruhan hidup manusia adalah proses, ada harapan dan penantian. Itulah

eksistensi dinamika kehidupan manusia. Unsur-unsur dinamika yang berfungsi secara seimbang dan integral menghantar manusia sungguh-sungguh menjadi pribadi rohani-jasmani. Lebih lanjut Driyarkara (1980:72) mengatakan bahwa peraih pengetahuan harus dilihat dalam kerangka yang lebih kompleks, yakni sebagai aktivitas fundamental manusia dalam dunianya. Pendidikan dan aktivitas studi merupakan aktivitas fundamental, karena apa yang dikerjakan oleh manusia itu berkaitan dengan pencarian akan jati dirinya. Aktivitas semacam ini dimaknai sebagai tindakan pendidikan karena diberi arti tertentu, yakni bahwa perbuatan itu membawa manusia tersebut ke taraf atau level insani.

Dalam konteks Pendidikan Agama, aktivitas studi dengan demikian berisi rangkaian aktivitas untuk mengubah dan menentukan hidup manusia dalam kaitan dengan diri, sesama, dan Tuhannya. Di situlah tampak bahwa Pendidikan Agama pada akhirnya menjadi sebuah tindakan yang hendak memanusiaikan dan sekaligus mengilluminasikan manusia. Pendidikan Agama seharusnya juga menjadi bagian dari aktivitas pengangkatan manusia ke taraf yang makin insani dan juga makin Illahi. Jadi, proses mendidik agama sebenarnya merupakan proses pengungkapan jati diri manusia muda untuk sampai pada kesadaran akan eksistensi dirinya sendiri yang otentik.

Pendidikan Agama yang holistik memberikan ruang kepada anak untuk memiliki kesadaran baru dalam mengerti dirinya, kemampuannya, dan keberadaannya. Pendidikan Agama yang baik seharusnya menekankan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan, yang akhirnya anak semakin menyadari bahwa ia bukan hanya makhluk biologis, melainkan makhluk yang berpribadi dengan kodrat rohaninya. Dalam alur pikir semacam ini, Pendidikan Agama seharusnya memampukan tiap peserta didik untuk menemukan dirinya, sesamanya, dan Tuhannya dengan lebih baik. Pendidikan Agama dengan demikian harus mempromosikan nilai-nilai kebaikan, misalnya: antikekerasan, penghargaan akan multikulturalisme, hormat kepada pemeluk agama lain, dan penghapusan eksklusivisme dengan menganggap diri sebagai kaum yang paling dicintai Tuhan.

Lembaga pendidikan (apalagi lembaga pendidikan formal) sebagai tempat *transfer of knowledge* dalam kacamata ini mempunyai tanggungjawab untuk mentransfer nilai-nilai etis. Di tengah kondisi bangsa yang rentan perpecahan ini, Pendidikan Agama seharusnya bisa berkontribusi dengan memekarkan semangat kejujuran, anti korupsi, dan penghargaan akan saudara sebangsa sebagai makhluk Tuhan yang sama, daripada repot untuk mengkafirkan pemeluk agama lain, sekedar menghafal ayat-ayat Kitab Suci, dan mempelajari cara berdoa yang khusus menurut guru agama masing-masing. Mengapa? Karena tidak ada gunanya aneka kesalehan formal tersebut jika tetap saja mental koruptif dan munafik tetap melekat di segala bidang. Bukankah ini yang terjadi dengan negara

kita yang semua penduduknya dikenal mempunyai agama tetapi ternyata indeks korupsi juga mendapat gelar juara?

Pendidikan agama dan kuliah agama seharusnya adalah pendidikan perdamaian, penumbuh kembang aspek humanis, pemekar budaya insani, dan bukannya pendidikan akan penguasaan agama, sebab omong kosong orang menguasai agama, apalagi seperti yang dikurikulumkan oleh negara. Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan ber-Pancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Sejarah Indonesia dan dunia bahkan mencatat betapa besar andil agama dalam membakar kebencian, meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian, dan mengundang konflik (Haryatmoko, 2010: 82). Haryatmoko (2010:82-83) bahkan mengatakan bahwa agama justru kerap kali memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi aneka konflik. Pendidikan Agama seharusnya mengembangkan dimensi inklusivitas. Hal ini yang seharusnya dimekarkan dalam Pendidikan Agama yang diajarkan oleh guru yang seagama seturut Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan Agama haruslah selaras dengan nilai aduhung bangsa yang dinamai Pancasila!

2.3. Pancasila Sebagai Dasar Menolak Radikalisme Agama di Indonesia

Sejarah mengatakan bahwa perumusan dasar negara menjadi apa yang dikenal seperti sekarang ternyata melalui jalan panjang. Sampai akhir rapat pertama pada sidang BPUPKI masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil yang dinamai Panitia Sembilan untuk membahas berbagai masukan. Setelah melakukan kompromi antara empat orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan empat orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang berisikan: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Perjalanan sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta ini mendapat perlawanan terutama dari pihak non-muslim dan masyarakat dari Indonesia Timur. Akhirnya tujuh kata dalam sila pertama dicoret menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi mengakomodasi semua pihak yang nantinya hidup bersama dalam alam Indonesia merdeka. Romantisme untuk kembali kepada Piagam Jakarta inilah yang setidaknya ingin dihidupkan oleh kaum radikal dengan berbagai cara, (Nurjannah, 2013, 21) padahal menyisipkan terminologi “kewajiban menjalankan agama” berarti menempatkan negara sebagai kekuatan pemaksa dalam beragama, dan impilkasinya pasti akan runyam. Negara kemudian berhak untuk menghukum kaum yang tidak menjalankan agama (*bolong* puasa, tidak membayar zakat, tidak

sembahyang, dst) jika klausul tersebut disisipkan. Penghayatan agama lalu menjadi sekedar formalisme, tampak lahir, dan sejauh tidak dihukum oleh negara. Penghayatan agama bukan lagi soal hubunganku dengan Tuhanku. Berita Republik Indonesia tahun 1946 berikut ini memuat rumusan resmi Pancasila:

“... Ketoehanan Jang Maha Esa, Kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/ perwakilan, serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia (Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946).

Jika Mukadimah Konstitusi Proklamasi mencantumkan dasar negara, maka rumusan inilah yang dipakai secara resmi sebagai pondasi Indonesia merdeka. Jika pondasi ini diganti, maka runtuhlah bangunan Indonesia. Boelars (2009:147) mencatat bahwa meskipun UUD 1945 sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, masih juga ada pihak yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar lain. Faith (1988:15) dalam pengantarnya untuk pidato Soekarno di depan BPUPKI berargumentasi bahwa Pancasila adalah usaha keras Soekarno untuk menentang gagasan didirikannya negara agama dan sekaligus mendamaikan perbedaan pendapat antara kaum nasionalis dan kaum agama. Hal ini tampak dalam pidato Soekarno berikut ini:

“Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong.’ Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.)

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau berbentuk negara sekular. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. ”Semua buat semua” serta “tiada egoisme agamis,” demikian Soekarno berbicara. Darmaputera (1989:291) di titik ini menyimpulkan bahwa Indonesia merdeka ‘bukanlah Negara Islam dan bukan Negara sekular,’ tetapi negara Pancasila. Soekarno memimpikan terwujudnya ”Indonesia bagi semua,” maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun Indonesia yang sama:

“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’.... Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia,....tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong.’.... Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!.....Prinsip gotong-royong diantara yang kaya dan tidak kaya, antara Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudara-saudara (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 71-82).”

Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Segala perbedaan sosial diakomodasi secara mengagumkan dalam Pancasila, sehingga inilah letak keunggulan Pancasila sebagai landasan ideal bagi kehidupan berbangsa serta bernegara, bahkan bermasyarakat. Bangsa dan masyarakat Indonesia dalam dimensi hidupnya yang terdalam dipersatukan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilengkapi horizontal oleh sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Bila sikap dasar vertikal dan horizontal itu dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsekuan dan konsisten, maka buahnya adalah budaya persahabatan, persaudaraan, saling mengisi, dan memekarkan.

Pancasila dengan demikian adalah nilai-nilai anti-radikalisme itu sendiri. Gerakan untuk mendasarkan diri atas agama tertentu yang dilakukan dengan cara radikal sebenarnya adalah penolakan atas nilai-nilai Pancasila. Mana bisa orang mengaku ber-Tuhan tetapi serentak melanggar nilai kemanusiaan dengan membuat bom yang membunuh orang lain? Mana mungkin orang mengaku membela Tuhan tetapi serentak tidak mau berembuk (bermusyawarah) dan memilih untuk menyelesaikan segala persoalan dengan anarki yang menyakiti persatuan bangsa dan melawan keadilan?

III. KESIMPULAN

Teologi, pendidikan, dan kuliah agama seharusnya adalah pendidikan perdamaian, penumbuh kembang aspek humanis, pemekar budaya insani, dan bukannya pendidikan akan penguasaan materi agama yang amat bernuansa formal. Pendidikan agama haruslah selaras dengan nilai adiluhung bangsa yang dinamai Pancasila! Paham bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur dan ber-Pancasila harus terus disadari dan diperjuangkan bersama. Betul bahwa

bangsa ini satu, tetapi kesatuan ini dibangun di atas dasar keberagaman budaya, agama, suku, ras, dst. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap “yang lain”, dan itulah pintu menjadi radikal.

Manusia adalah *human being*, tetapi manusia juga adalah dia yang *being human*. Dia yang menjadi makin manusiawi. *Human being* adalah *being human* pula. Manusia tidak sempurna. Manusia adalah "ada" yang belum penuh. Bilamana ia menjadi penuh? Bila hidupnya menampilkan kenyataan bahwa dia sedang memanusiawi dan memperlakukan sesamanya secara manusiawi, sebagaimana dia memperlakukan dirinya atau mengharapkan orang lain memperlakukannya demikian, dan radikalisme adalah tindakan yang merusak kemanusiaan. Negara Indonesia bukanlah negara yang tidak ber-Tuhan, tetapi akan menjadi sangat lain ceritanya jika keyakinan akan Tuhan ini membuatnya menolak rekan sebangsanya yang lain. Pancasila membari pondasi yang kuat bagaimana seharusnya manusia Indonesia memeluk agamanya. Pembaharuan agama untuk kembali ke akar adalah hak setiap penganut agama, tetapi tentu akan menimbulkan masalah ketika gerakan kembali ke akar hanya dimaknai sempit sebatas penegakkan hukum agama tertentu (bahkan dengan cara keji sekalipun) dan penaklukkan pemeluk agama lain di tengah Indonesia yang majemuk dan ber-Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Ahmad., 2015, “Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas”, dalam *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No.2, Lampung
- , *Berita Repoeblik Indonesia* Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946)
- Dahm, Bernhard, 1965, *Sukarno and The Struggle for Indonesia Independence*, Ithaca, Cornell University Press
- Darmaputera, Eka, 1989, *Pancasila: Identitas dan Integritas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia,
- Darmodiharjo, Dardji., 1979, *Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang-USaha Nasional, Surabaya
- Driyarkara, 1980, *Kumpulan Karangan Driyarkara*, Yogyakarta: Kanisius
- Faith, Herbert (ed), 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta, Pustaka LP3ES
- Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat Anti Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta
- Nashir, Haedar, 2007, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*
- Nurjannah, 2013, “Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah,” dalam *Jurnal Dakwah (Media Komunikasi dan Dakwah UIN Yogyakarta)*, Vol. 14, No. 2, Yogyakarta
- Rokhmad, Abu, 2012, ”Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”, dalam *Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian dan Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 1, Semarang
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta.
- Turmudi, Endang, 2005, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta
- Umar, Ahmad Rizky, 2010, “Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia,” dalam *JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM)*, Vol. 14. No. 2, Yogyakarta
- Yunus, Faiz., 2017, “Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam”, dalam *Jurnal Studi Al Qur-an*, Vol. 13 No. 1, Jakarta